

## PENERAPAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN PENCAIRAN DANA MUAT DI PT YUDHISTIRA PERKASA ABADI

**Nabila Dwi Putri**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur  
22013010096@student.upnjatim.ac.id

**Selma Putri Safira**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur  
selma.putri.febis@upnjatim.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini tentang Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Pencairan Dana Muat PT Yudhistira Perkasa Abadi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pencairan dana muat di PT Yudhistira Perkasa Abadi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi diterapkan melalui keterbukaan informasi, dokumentasi yang sistematis, serta pelibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi dan otorisasi. Sementara itu, akuntabilitas diwujudkan melalui pembagian tanggung jawab yang jelas, penggunaan dokumen resmi seperti voucher dan Nota Pencairan Dana (NPD), serta pencatatan transaksi secara tertib. Mekanisme pencairan dana muat yang diterapkan telah mendukung praktik keuangan yang profesional, tertib, dan dapat dipercaya.

**Kata kunci :** *Transparansi, Akuntabilitas, Pencairan Dana, Dana Muat.*

### ABSTRACT

*This study examines the implementation of transparency and accountability principles in the management of loading fund disbursement at PT Yudhistira Perkasa Abadi. The objective of the research is to analyze how transparency and accountability are applied in the company's financial disbursement procedures. The study uses a descriptive qualitative method, with data collected through observation and interviews. The findings reveal that transparency is implemented through open access to information, systematic documentation, and the involvement of multiple parties in the verification and authorization process. Meanwhile, accountability is demonstrated through clear divisions of responsibility, the use of official documents such as vouchers and Disbursement Notes (NPD), and orderly transaction recording. The loading fund disbursement mechanism in place supports a professional, organized, and trustworthy financial management practice.*

**Keywords :** *Transparency, Accountability, Fund Disbursement, Loading Fund.*

## PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar fundamental dalam praktik tata kelola keuangan modern yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan integritas. Dalam konteks manajemen keuangan organisasi, khususnya pada perusahaan jasa, kedua prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai strategi untuk membangun kepercayaan, menghindari penyimpangan, serta memperkuat struktur pengawasan internal. Menurut Rosidah, I., et al., 2023; Wonar et al. (2018) sebagaimana dikutip dalam Devi dkk (2025), transparansi dan akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sistem keuangan perusahaan, terutama dalam mengantisipasi praktik-praktik yang berpotensi merugikan secara finansial.

Di sektor jasa, proses pencairan dana muat merupakan aktivitas penting yang berkaitan langsung dengan kelangsungan operasional harian bagian muat. Tahapan-tahapan dalam pencairan dana muat seperti pengajuan permintaan pembayaran, verifikasi dan persetujuan, pencairan dana, hingga pencatatan dan pengarsipan transaksi, perlu dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan yang tidak transparan atau tanpa pertanggungjawaban yang memadai dapat menimbulkan ketidakefisienan, duplikasi transaksi, dan potensi pelanggaran prosedur.

PT Yudhistira Perkasa Abadi dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan ini telah mengembangkan sistem pencairan dana muat yang cukup terstruktur. Prosedur pencairan dilakukan melalui pengajuan menggunakan voucher yang telah distandardkan, proses verifikasi dan persetujuan berjenjang oleh berbagai pihak terkait, serta pencatatan keuangan yang dilakukan secara harian melalui spreadsheet. Namun demikian, proses yang masih bersifat manual dan bergantung pada dokumen fisik menyisakan ruang untuk perbaikan dalam hal efektivitas dan integrasi sistem.

Berdasarkan observasi awal, proses pencairan dana muat di PT Yudhistira Perkasa Abadi masih dilakukan secara manual dan sangat bergantung pada dokumen fisik, seperti voucher dan nota pencairan. Sistem pencatatan kas harian menggunakan spreadsheet sederhana tanpa

integrasi antardepartemen, sehingga rentan terhadap keterlambatan input data dan kesalahan administratif. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi langsung serta wawancara dengan manajer keuangan dan manajer operasional untuk menilai tingkat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Hasil analisis mengindikasikan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan perbaikan melalui sistem verifikasi berjenjang, standarisasi dokumen voucher, dan pengarsipan digital dasar. Penelitian ini juga menyajikan rekomendasi untuk pengembangan sistem pencatatan keuangan yang lebih terintegrasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas organisasi.

Sine (2021) melakukan penelitian berjudul "*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada Sekolah di Kota Kupang)*" dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan dana BOS di enam sekolah negeri di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik di setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang melibatkan berbagai pihak. Namun, dari sisi transparansi, masih ditemukan kekurangan dalam hal publikasi, seperti tidak semua sekolah memasang laporan pertanggungjawaban di papan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek akuntabilitas telah berjalan dengan baik, transparansi masih perlu ditingkatkan untuk menjamin keterbukaan informasi kepada publik.

Mais & Palindri (2020) melakukan penelitian tentang "*Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mengelola Keuangan Desa*". Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengelola keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Pemerintah Desa Suka Damai telah menerapkan prinsip

akuntabilitas dan transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk merencanakan dan mendiskusikan isu-isu terkait keuangan desa serta pelaksanaan pembangunan. Selain itu, mereka juga menyusun laporan keuangan desa dan mempublikasikannya melalui papan informasi yang memuat rincian mengenai keuangan desa, serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Handika Surya Dinata dkk. (2023) melakukan penelitian berjudul “*Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMAN 12 Kota Pekanbaru*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 12 Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SMAN 12 telah berjalan dengan baik. Penerapan prinsip akuntabilitas terlihat dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengelolaan program Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis). Sementara itu, penerapan prinsip transparansi ditunjukkan melalui penyusunan anggaran sekolah yang dibahas dalam rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan perwakilan OSIS, serta penyampaian laporan melalui sistem publik.

Dengan demikian, mengingat pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas serta temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana muat di PT Yudhistira Perkasa Abadi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik tata kelola keuangan yang baik dan dapat dijadikan acuan bagi perusahaan jasa lainnya dalam menyusun prosedur pengelolaan dana operasional yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

## KAJIAN TEORI

### Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi atau keterbukaan dalam penyampaian informasi selama pelaksanaan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang memerlukannya (Mais & Palindri, 2020).

Menurut Mardiasmo (2018), transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan publik yang menekankan keterbukaan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan untuk memungkinkan pengawasan yang objektif. Keterbukaan ini melibatkan penyediaan informasi yang komprehensif, akurat, dan mudah diinterpretasi oleh pengguna laporan. Dalam konteks perusahaan jasa, implementasi transparansi diwujudkan melalui keterbukaan proses administrasi, pelaporan keuangan, serta penyediaan dokumen pendukung yang dapat diakses oleh pihak-pihak terkait.

Dalam konteks pengelolaan proses pencairan dana muat, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan pada setiap tahapan administratif, mulai dari pengajuan permintaan pembayaran, verifikasi dokumen, hingga pelaporan penggunaan dana. Penerapan prinsip ini berperan penting dalam mencegah potensi penyimpangan administratif, memperkuat pengawasan internal, serta membangun kepercayaan antarunit kerja dalam sistem keuangan perusahaan.

### Akuntabilitas

Menurut Handika Surya Dinata dkk. (2023), Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu-individu yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik, yang berkaitan dengan kemampuan mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah terciptanya kepercayaan, baik dari internal organisasi maupun pemangku kepentingan eksternal.

Menurut Mahmudi (2019), akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban yang melekat pada setiap pengelola sumber daya untuk memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan, pengelolaan, serta hasil yang telah dicapai kepada pihak yang

memiliki otoritas untuk menilai kinerja tersebut. Akuntabilitas yang efektif menuntut adanya sistem pelaporan dan mekanisme evaluasi yang terstruktur, terdokumentasi dengan baik, serta dapat diaudit secara independen. Dengan demikian, akuntabilitas berperan sebagai landasan utama dalam menjamin pengelolaan dana perusahaan agar terlaksana secara efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Dalam konteks pengelolaan pencairan dana, akuntabilitas tercermin dari adanya kejelasan tanggung jawab pada setiap tahapan proses, mulai dari pengajuan permintaan pembayaran, otorisasi pejabat terkait, hingga pelaporan penggunaan dana. Pihak yang terlibat harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan keuangan yang diambil melalui bukti administratif seperti nota pencairan dana, voucher, dan dokumen pendukung lainnya. Dengan akuntabilitas yang terstruktur, perusahaan dapat meminimalisasi kesalahan pengelolaan, mempercepat audit internal, dan memperkuat integritas sistem keuangan secara menyeluruh.

### **Pengelolaan Pencairan Dana Muat**

Pengelolaan proses pencairan dana muat merupakan rangkaian kegiatan administratif yang mengatur alur pengajuan dana muat, verifikasi, pencairan, hingga pelaporan penggunaan dana dengan tujuan menjaga sistem keuangan tetap tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan temuan Heka Ate dkk. (2023), yang menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana yang lebih optimal terjadi ketika didukung oleh mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam sistem pelaporan dan monitoring keuangan. Oleh karena itu, sistem pencairan dana muat sebaiknya tidak hanya mengikuti alur formal, tetapi juga dilengkapi dengan dokumentasi lengkap, otorisasi bertingkat, dan pengawasan rutin untuk memastikan setiap tahap pencairan mendukung praktik tata kelola keuangan yang baik.

### **Pengertian Dan Peran Kegiatan “Muat” Dalam Pencairan Dana**

Dalam konteks operasional di PT Yudhistira Perkasa Abadi, istilah “muat” merujuk pada aktivitas permuatan barang ke kontainer maupun truck pengangkut sebagai

bagian dari proses pengiriman. Aktivitas ini melibatkan buruh muat dan tenaga operasional (Kerani/Tallyman lainnya yang bekerja di lapangan). Kegiatan muat merupakan tahapan penting dalam rantai logistik perusahaan, terutama yang bergerak di bidang jasa atau penyediaan barang fisik, karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran distribusi barang ke tujuan akhir.

Dari sisi manajemen keuangan, kegiatan muat berkaitan erat dengan pengajuan pencairan dana, khususnya dalam bentuk biaya operasional. Biaya ini mencakup antara lain:

- a) Upah buruh muat
- b) Biaya konsumsi atau uang makan buruh
- c) Transportasi local
- d) Biaya tambahan plastik, triplek untuk pelindung/penahan barang di didalam Container sesuai keperluan & kondisi dilapangan.
- e) Sewa alat bantu muat (forklift), biaya Crane di Depo Container/dipelabuhan.
- f) Kompensasi kerja lembur (jika ada)

Peran “muat” dalam sistem pengelolaan keuangan perusahaan adalah sebagai komponen pengeluaran kas operasional yang sifatnya bersentuh langsung dilapangan/lokasi pabrik, gudang, depo maupun pelabuhan yang rutin namun perlu dikendalikan secara ketat. Jika tidak didokumentasikan dan diajukan dengan tepat, biaya muat dapat menimbulkan pemberoran atau potensi penyimpangan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan fenomena yang ada tanpa melakukan manipulasi terhadap data variabel yang diteliti, melalui metode wawancara langsung (Bahri, 2017: 73) sebagaimana dikutip dari (Hanyfah dkk., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pencairan dana di PT Yudhistira Perkasa Abadi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di

lapangan dengan mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dan mencatat segala sesuatu yang relevan dengan penelitian (Hanyfah dkk., 2022). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan oleh peneliti selama masa magang di PT Yudhistira Perkasa Abadi, khususnya di bagian keuangan dan operasional muat.

## 2. Wawancara

Menurut Stewart dan Cash (2000) sebagaimana dikutip dari Amitha Shofiani Devi dkk. (2024), Wawancara adalah proses komunikasi yang bersifat interaktif antara dua pihak, di mana setidaknya salah satu pihak memiliki tujuan yang jelas dan signifikan, dan umumnya melibatkan sesi tanya jawab. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap manajer operasional dan manajer keuangan PT Yudhistira Perkasa Abadi, khususnya yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan dana muat, guna memperoleh informasi mendalam terkait penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Data dianalisis secara kualitatif dengan mengikuti tahapan :

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil Tindakan (Zulfirman, 2022).

### 2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses yang melibatkan pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan yang dibuat di lapangan (Rijali, 2019).

### 3. Penyajian data

Menurut Nurhaswinda dkk. (2025), penyajian data adalah proses pengorganisasian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk ringkasan, diagram, dan format lainnya.

### 4. Penarikan kesimpulan

Menurut Sugiyono (2019) sebagaimana dikutip dari Nugroho (2023), Penarikan kesimpulan adalah proses memberikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh, di mana kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

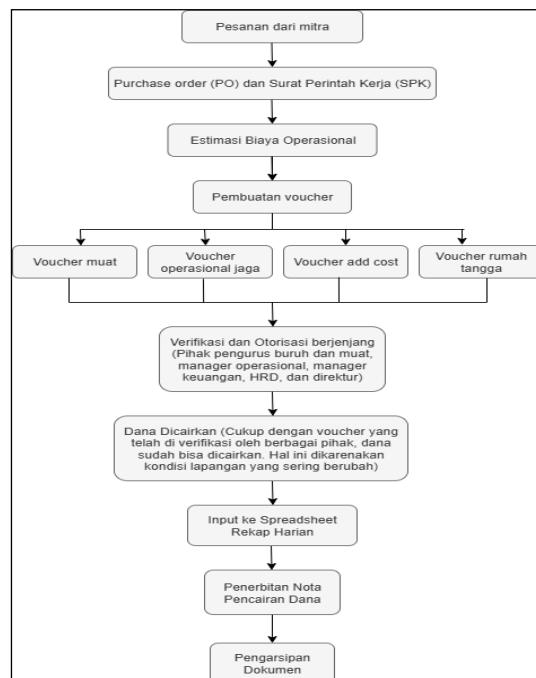
Objek dalam penelitian ini adalah PT Yudhistira Perkasa Abadi, sebuah perusahaan jasa

yang telah menerapkan sistem pencairan dana berbasis prosedur formal dan terdokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung proses, alur kerja, serta pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan pencairan dana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan dari penelitian yang dilakukan di PT Yudhistira Perkasa Abadi mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pencairan dana muat. Pembahasan disusun secara deskriptif berdasarkan pengamatan langsung, observasi dan wawancara informal dengan pihak-pihak terkait. Setiap subbagian akan membahas tahapan pencairan dana, penerapan prinsip transparansi, penerapan dan akuntabilitas. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tata kelola keuangan yang diterapkan perusahaan dalam aktivitas operasionalnya.

### Proses Pencairan Dana Muat



**Gambar 1.** Alur Proses Pencairan Dana  
(Sumber : Diolah penulis, 2025)

Berdasarkan hasil observasi langsung di lokasi kerja serta wawancara dengan Manajer Keuangan dan Manajer Operasional PT Yudhistira

Perkasa Abadi, diperoleh gambaran bahwa alur pencairan dana muat di perusahaan ini telah disusun secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Alur pencairan dana muat di PT Yudhistira Perkasa Abadi disusun secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik untuk mendukung pengelolaan keuangan operasional yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional dan Manager Keuangan, dijelaskan bahwa alur pencairan dana muat berasal dari adanya pesanan mitra, yang kemudian diterbitkan Purchase Order (PO) yaitu berisi perjanjian antara pihak customer dan pihak perusahaan dan Surat Perintah Kerja (SPK) berisi informasi penting seperti jenis pekerjaan, jumlah muatan, dan harga satuan. Dokumen SPK menjadi dasar estimasi kebutuhan biaya muat. Setelah SPK diterbitkan, staf operasional melakukan estimasi biaya muat harian berdasarkan kuantitas pekerjaan. Biaya ini meliputi upah buruh muat, uang makan, transportasi lokal, perlengkapan tambahan (triplek, plastik), sewa alat berat seperti forklift atau crane, serta kompensasi kerja lembur. Estimasi tersebut dituangkan ke dalam voucher muat, yang disusun oleh staf lapangan dan disetujui oleh manajer operasional.

Dokumen voucher tersebut selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan untuk dibuatkan dokumen resmi pengajuan dana. Berikut penuturan hasil wawancaranya,

*"Jadi begini untuk alurnya, ini dimulai dari adanya pesanan dari mitra, nah nantinya akan muncul Purchase order (PO) dan SPK. Apa itu Purchase Order (PO) dan SPK? Purchase order itu berisi perjanjian-perjanjian pihak customer dan pihak perusahaan, sedangkan SPK itu surat perintah kerja. Nah, SPK ini yang bakal jadi acuan untuk biaya biaya yang dibutuhkan dibagian Muat... Biaya biaya muat ini ada biaya untuk upah buruh muat, uang makan, transportasi lokal, perlengkapan tambahan (triplek, plastik), sewa alat berat seperti forklift atau bisa disebut crane, dan kompensasi kerja lembur apabila ada... Nantinya akan disusunkan estimasi biaya ini oleh staf operasional dengan SPK sebagai acuan tadi yang saya sudah jelaskan dan ini harus ada persetujuan oleh manager operasional.*

*Lalu diserahkan ke bagian keuangan untuk disusunkan voucher sesuai dengan jenis biayanya."*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional dan Manager Keuangan, terdapat tiga jenis voucher yang digunakan:

1. Voucher muat dan operasional juga lapangan, adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan dana berdasarkan kebutuhan kegiatan muat barang sesuai dengan jadwal dan kuantitas yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Voucher muat mencatat biaya yang berhubungan langsung dengan proses bongkar-muat seperti biaya buruh, biaya bongkar dan biaya operasional juga wilayah. Fungsi utama voucher muat adalah sebagai bukti pengajuan dana untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam proses pemuatan barang.
2. Voucher biaya tambahan (add cost), adalah dokumen yang diajukan untuk membiayai kebutuhan mendesak atau pengeluaran yang tidak termasuk dalam perhitungan awal. Biaya tambahan ini dapat muncul akibat perubahan rute pengiriman, penambahan tenaga kerja, atau kondisi operasional yang tidak terduga. Selain itu, Voucher add cost digunakan ketika ada kebutuhan tambahan yang sifatnya tidak terduga, misalnya kerusakan alat atau kebutuhan darurat lainnya, biaya treatment, dan lain lain. Voucher ini bersifat fleksibel dan disusun setelah adanya justifikasi dari lapangan, kemudian disetujui oleh pihak yang berwenang.
3. Dari hasil wawancara oleh manajer keuangan, biasanya dalam biaya tidak terduga ini, pekerja lapangan membiayai kebutuhan itu terlebih dahulu dikarenakan beberapa kebutuhan lapangan harus dipenuhi saat itu. Hal ini pasti diganti oleh pihak perusahaan dengan syarat adanya bukti pembayaran seperti nota pembayaran jika pembayaran dilakukan dengan tunai atau bukti transfer m-banking jika dilakukan secara non-tunai.
3. Voucher operasional/rumah tangga, adalah dokumen pengajuan dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional harian perusahaan seperti biaya listrik,

biaya kebutuhan bahan pangan, biaya bbm para manajer dan direktur, biaya air dan biaya lainnya.

Berikut penuturan hasil wawancaranya,

*“Jadi, di tempat kami itu ada tiga jenis voucher yang biasa dipakai, ya. Yang pertama itu voucher muat dan operasional jaga lapangan. Nah, voucher ini biasanya diajukan untuk keperluan kegiatan muat barang, sesuai sama jadwal dan jumlah barang yang tercantum di SPK. Jadi, semua biaya yang berhubungan langsung sama kegiatan bongkar-muat masuknya ke voucher ini. Misalnya kayak biaya buruh, biaya bongkar, sama biaya operasional untuk jaga lapangan. Intinya sih voucher muat ini dipakai buat ngajuin dana tenaga kerja yang terlibat langsung di proses muat barang itu...”*

*“Terus, yang kedua itu voucher biaya tambahan atau biasa kita sebut add cost. Nah, ini biasanya diajukan kalau ada pengeluaran di lapangan yang enggak terduga atau enggak masuk di estimasi awal. Contohnya tuh kayak ada perubahan rute, perlu tambahan tenaga kerja, atau mungkin kondisi di lapangan berubah mendadak gitu. Kadang juga kalau ada alat yang rusak, terus butuh perbaikan cepat, ya itu bisa diajukan lewat voucher add cost. Tapi voucher ini tetap harus ada penjelasan dari lapangan dulu, semacam justifikasi gitu, baru nanti disetujui sama pihak yang berwenang..”*

*“Nah biasanya nih, kalau udah kepepet di lapangan, orang lapangan tuh kadang langsung keluarin uang pribadi dulu buat nutup kebutuhan itu. Soalnya emang enggak bisa nunggu proses pengajuan selesai dulu. Tapi nanti pasti diganti sama perusahaan, asal ada bukti pembayarannya. Bisa berupa nota kalau dibayar tunai, atau bukti transfer kalau lewat m-banking. Jadi, bukti itu penting banget buat proses reimburse..”*

*“Yang terakhir itu voucher operasional atau rumah tangga. Nah, ini khusus buat kebutuhan harian operasional kantor. Isinya tuh kayak biaya listrik, air, bahan pangan, terus juga BBM untuk manajer*

*atau direktur, dan kebutuhan rutin lainnya. Jadi beda ya sama voucher muat atau add cost, karena ini enggak langsung terkait sama proses muat di lapangan, tapi lebih ke operasional internal Perusahaan..”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional dan Manager Keuangan, dijelaskan bahwa, semua voucher ini harus melalui proses verifikasi dan otorisasi oleh berbagai pihak, mulai dari pengurus muat, admin lapangan, manajer operasional dan keuangan, HRD, hingga direktur. Setelah mendapatkan persetujuan, dana dapat dicairkan baik secara tunai maupun melalui transfer bank. Berikut penuturan hasil wawancaranya,

*“Voucher yang telah disusun ini nantinya perlu tanda tangan dari berbagai pihak. Siapa saja? Ada pengurus muat, admin lapangan, manajer operasional dan keuangan, HRD, sampai ke direktur. Hal ini dikarenakan biaya yang diajukan harus ada persetujuan dari pihak-pihak itu bil.. agar bisa cair dananya..”*

Dengan hanya mengandalkan voucher sebagai acuan pencairan, perusahaan sudah dapat mengeluarkan dana. Hal ini dikarenakan proses operasional di lapangan seringkali berubah secara mendadak, misalnya karena pembatalan orderan atau perubahan jadwal. Namun, agar pelaporan dan pengarsipan keuangan tetap seimbang, maka voucher ini nantinya akan disesuaikan dengan Nota Pencairan Dana (NPD). Berikut hasil penuturan wawancaranya,

*“Cukup voucher aja bil dana sudah cair, yang terpenting di voucher ada tanda tangan pihak yang bersangkutan.. agar balance antara pencairan awal dengan voucher maka bisa disingkronkan kembali disamakan dengan NPD apakah sudah sesuai.. kenapa harus menggunakan voucher diawal karena situasi dilapangan kadang bisa ada perubahan/cancel dalam orderan, maka sebelum masuk ke NPD lebih baik memastikan angka nominal di voucher sebelum tercetak NPD..”*

Selanjutnya, bagian keuangan akan melakukan input data ke dalam spreadsheet

rekapitulasi kas harian, diikuti dengan diterbitkannya Nota Pencairan Dana (NPD) sebagai bukti resmi pencairan. Nota Pencairan Dana (NPD) adalah dokumen resmi yang digunakan secara internal oleh perusahaan sebagai bukti permintaan dan persetujuan untuk pengeluaran dana. Seluruh dokumen kemudian diarsipkan oleh pihak terkait untuk keperluan pelaporan dan audit internal. Berikut penuturan hasil wawancaranya,

*“Selanjutnya, data diinput ke spreadsheet harian perusahaan, ini diinput oleh bagian keuangan. Dan yang terakhir, bagian keuangan membuat NPD sebagai bukti resmi pengeluaran dana muat.. tahap akhir dokumen diarsip oleh masing-masing bagian yang bersangkutan bil..”*

Melalui tahapan ini, dapat dilihat bahwa proses pencairan dana muat dijalankan melalui alur kerja yang tertib, terdokumentasi, dan berlapis otorisasi. Sistem ini tidak hanya menunjukkan efisiensi kerja, tetapi juga menjadi dasar penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan operasional di lapangan.

### **Penerapan Transparansi dalam Proses Pencairan Dana**

Berdasarkan hasil observasi peneliti serta wawancara dengan Manajer Operasional dan Manajer Keuangan PT Yudhistira Perkasa Abadi, diketahui bahwa transparansi dalam proses pencairan dana muat telah diterapkan secara nyata dan konsisten dilingkungan perusahaan. Transparansi dalam pencairan dana muat di PT Yudhistira Perkasa Abadi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi semata, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan prosedur yang sistematis, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri. Prosedur tersebut menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa setiap aktivitas keuangan berjalan secara terbuka, melibatkan berbagai pihak, dan dapat diawasi oleh pihak internal perusahaan. Dengan demikian, penerapan transparansi di sini bukan sekadar teori, tetapi telah menjadi bagian nyata dari praktik pengelolaan keuangan operasional di lapangan.

Praktik transparansi dimulai ketika bagian operasional menyusun estimasi biaya

berdasarkan kebutuhan kegiatan muat. Estimasi ini disampaikan secara terbuka kepada bagian keuangan, yang kemudian disusunkan voucher berdasarkan rincian biaya tersebut. Setiap voucher memuat informasi yang rinci terkait jenis biaya, nominal dana yang dibutuhkan, serta tujuan penggunaannya. Seluruh dokumen disusun secara tertulis dan terdokumentasi, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami dan menelusuri penggunaan dana secara jelas.

Proses otorisasi juga dilakukan secara terbuka dan berjenjang. Voucher yang telah disusun diverifikasi dan disetujui oleh beberapa pihak yang berwenang, seperti pengurus buruh dan muat, admin muat, manajer operasional, manajer keuangan, HRD, hingga direktur. Mekanisme ini menciptakan lapisan pengawasan yang saling menguatkan dan mencegah adanya pengambilan keputusan sepihak.

Setelah dana dicairkan, bagian keuangan mencatat transaksi tersebut ke dalam spreadsheet rekap kas harian. Bukti transaksi dan dibuatkan Nota Pencairan Dana (NPD) juga disimpan dan diarsipkan dengan baik, sehingga seluruh proses dapat dipantau sewaktu-waktu untuk keperluan audit atau evaluasi. Melalui sistem pencatatan yang terbuka, dokumentasi yang lengkap, serta libatkan banyak pihak dalam proses otorisasi, PT Yudhistira Perkasa Abadi menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan dana muat.

Penerapan prinsip transparansi ini sejalan dengan pendapat (Mais & Palindri, 2020), transparansi mengacu pada keterbukaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menciptakan proses pengelolaan yang jujur dan dapat dipercaya. Praktik di PT Yudhistira Perkasa Abadi menunjukkan bahwa prinsip ini diterapkan melalui dokumentasi voucher yang rinci, sistem otorisasi berjenjang, serta pencatatan transaksi ke dalam spreadsheet kas harian yang terbuka. Hal ini sejalan dengan pendapat tersebut, karena setiap alur penggunaan dana dapat dilacak secara jelas oleh pihak internal perusahaan.

## **Penerapan Akuntabilitas dalam Proses Pencairan Dana**

Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, akuntabilitas dalam pengelolaan pencairan dana muat di PT Yudhistira Perkasa Abadi tercermin dari adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas, terdokumentasi, dan dapat diaudit pada setiap tahapan pengelolaan dana. Prinsip akuntabilitas tidak hanya dijalankan oleh bagian keuangan, tetapi juga melibatkan bagian operasional dan manajerial sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengajuan, pelaksanaan, dan pengawasan dana yang digunakan.

Tahapan akuntabilitas dimulai sejak estimasi biaya diajukan oleh bagian operasional berdasarkan kebutuhan muat harian. Estimasi ini ditandatangani dan disetujui oleh manajer operasional sebagai bentuk tanggung jawab atas rencana pengeluaran yang diajukan. Selanjutnya, bagian keuangan menyusun voucher berdasarkan estimasi tersebut dan memastikan bahwa rincian biaya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Proses otorisasi yang melibatkan banyak pihak seperti pengurus buruh dan muat, admin muat, manajer operasional, manajer keuangan, HRD, hingga direktur menjadi bentuk lain dari mekanisme akuntabilitas yang berlapis. Setiap tanda tangan otorisasi mencerminkan persetujuan dan pertanggungjawaban individual atas penggunaan dana perusahaan. Dengan demikian, tidak ada proses pencairan dana yang dilakukan secara sepahak atau tanpa pengawasan.

Setelah dana dicairkan, tanggung jawab tidak berhenti di situ. Bagian keuangan memiliki kewajiban untuk mencatat seluruh transaksi ke dalam sistem pelaporan keuangan harian berbasis spreadsheet. Selain itu, setiap transaksi disertai bukti pendukung berupa dokumen pengeluaran dan Nota Pencairan Dana (NPD) yang disimpan secara terpusat dan terdokumentasi dengan baik. Proses ini memastikan bahwa penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akuntansi, baik untuk kebutuhan internal maupun audit eksternal.

Secara keseluruhan, penerapan akuntabilitas di PT Yudhistira Perkasa Abadi

telah berjalan melalui struktur yang terorganisasi dan sistem pelaporan yang dapat ditelusuri. Hal ini menjadi indikator bahwa perusahaan memiliki komitmen dalam menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga bertanggung jawab dan professional.

Penerapan prinsip akuntabilitas ini sejalan dengan pendapat (Handika Surya Dinata dkk., 2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban individu atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Penerapan akuntabilitas di perusahaan tampak pada struktur otorisasi yang melibatkan banyak pihak, kewajiban pencatatan yang disiplin, serta dokumentasi Nota Pencairan Dana sebagai bukti formal pertanggungjawaban.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pencairan dana muat di PT Yudhistira Perkasa Abadi telah secara konsisten dan terdokumentasi menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi terlihat dari keterbukaan informasi antarbagian, penyusunan voucher yang didasarkan pada estimasi biaya yang realistik, serta pelaporan keuangan yang dilakukan melalui rekap spreadsheet harian. Di sisi lain, akuntabilitas terwujud melalui sistem otorisasi yang berlapis, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta dokumentasi resmi seperti Nota Pencairan Dana (NPD) dan bukti pengeluaran lainnya yang dapat diaudit.

Dengan penerapan kedua prinsip tersebut, perusahaan berhasil menciptakan tata kelola keuangan yang teratur, profesional, dan dapat dipercaya. Mekanisme pencairan dana muat yang diterapkan tidak hanya mendukung kelancaran operasional di lapangan, tetapi juga memperkuat integritas sistem keuangan internal. Temuan ini memberikan kontribusi empiris bagi praktik pengelolaan keuangan di perusahaan jasa lainnya, terutama dalam hal penguatan kontrol administrasi, peningkatan efisiensi, dan pencegahan potensi pemborosan dana operasional.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan dalam sistem pencatatan keuangan yang masih bersifat manual, yaitu menggunakan spreadsheet harian. Ketergantungan pada sistem manual tersebut dapat membuka celah terhadap risiko human error, keterlambatan pencatatan, dan kesulitan dalam pelacakan historis transaksi secara cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang lebih terintegrasi agar proses pencairan dana dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

## Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan ketertiban pengelolaan keuangan, khususnya dalam proses pencairan dana muat, perusahaan disarankan beralih dari sistem pencatatan manual berbasis spreadsheet ke sistem akuntansi digital yang terintegrasi. Penggunaan sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara real time, mendukung pengendalian dokumen berbasis digital, serta memudahkan koordinasi antarbagian tanpa harus menggunakan dokumen fisik. Penerapan sistem digital juga membantu mempercepat proses verifikasi dan pelaporan keuangan, sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan maupun keterlambatan pelaporan yang sering terjadi pada sistem manual.

Selain itu, untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan memastikan setiap pengeluaran memiliki dasar administrasi yang jelas, perusahaan sebaiknya mencairkan dana operasional muat setelah diterbitkannya Nota Pencairan Dana (NPD). Langkah ini akan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pencairan dana. Dengan penerapan sistem akuntansi digital yang terintegrasi dan tata kelola administrasi yang lebih tertib, diharapkan pengelolaan dana muat di PT Yudhistira Perkasa Abadi dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amitha Shofiani Devi, Khusnul Hotimah, Ramadhan Sakha A, Achmad Karimullah, & M. Isa Anshori. (2024). Mewawancara Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas. *MASMAN: Master Manajemen*, 2(2), 66–78. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i2.387>
- Devi, A. R. S., Prahasti, N. K., Dewi, K. P. R., & Kusumaningsih, A. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas: Strategi Dalam Mencegah Fraud di PT Multi Karya Liftindo*. 8(5).
- Handika Surya Dinata, Annie Mustika Putri, & Mentari Dwi Aristi. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMAN 12 Kota Pekanbaru. *AKUNTANSI* 45, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.852>
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarso, I. (2022). *Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash*.
- Heka Ate, J., Ratna, wati, & Rokhman, M. T. N. (2023). *Pengaruh Tansparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. 4, No 1, 20–25.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi manajemen sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>
- Nugroho, M. H. (2023). *Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMPN 2 Majalaya Pada Materi Persamaan Garis Lurus*. 5, No. 1.
- Nurhaswinda, N., Maulina, S. R. M., Azzahra, A., Jannah, F., Jannah, N., Fadila, N.

- A., Harza, Z. J., & Hariza Putra, N. (2025). Penyajian Data. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 3(1). <https://doi.org/10.35870/ljvit.v3i1.3709>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sine, E. P. T. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada Sekolah Di Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi*.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian*, 3(2).